

ABSTRAK

Sengketa perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi serta menjamin terlaksananya asas pemilu yang jujur dan adil. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilukada yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dibatasi oleh ketentuan syarat selisih suara yang diatur dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pengaturan tersebut menjelaskan bahwa pasangan calon harus memenuhi presentase tertentu untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan. Mahkamah Konstitusi dalam pelaksanaannya menerima perkara permohonan perselisihan hasil pemilukada meskipun syarat selisih suara tidak terpenuhi, terutama apabila ditemukan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Dalam penelitian ini, bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menerima permohonan penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilukada yang tidak memenuhi syarat berdasar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

Kata Kunci: Pemilukada, Mahkamah Konstitusi, Sengketa hasil pemilihan, Syarat selisih suara



ABSTRACT

Disputes regarding the results of regional head elections (Pemilukada) play a crucial role in upholding the quality of democracy and ensuring the implementation of principles of free and fair elections. In practice, the Constitutional Court's authority to resolve such disputes is constrained by the vote margin requirements stipulated in Article 158 of Law Number 10 of 2016 concerning the Election of Governors, Regents, and Mayors. These provisions dictate that candidate pairs must meet specific percentage thresholds to file a petition challenging election results. However, the Constitutional Court has accepted petitions regarding election result disputes even when these vote margin requirements were not met—particularly in instances involving structured, systematic, and massive violations. This study aims to analyze the grounds upon which the Constitutional Court accepts petitions for resolving regional election result disputes that fail to meet the requirements set forth in Article 158 of Law Number 10 of 2016.

Keyword: Regional head elections, Constitutional Court, Election result disputes, Vote margin requirement

